

Simalakama Rohingya



Teuku Kemal Fasya, dosen Antropologi FISIP Unimal menemui pengungsi rohingya yang ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Gampong Meunasah Mee Kandang, Lhokseumawe. Foto: Bustami Ibrahim

Oleh: Teuku Kemal Fasya

Ketika komunitas pengungsi Rohingya terlihat di perairan Bireuen, 26 Desember 2021, seluruh armada keamanan laut seperti kesepakatan sebelumnya untuk tidak mendaratkan kembali di Aceh. Mereka sempat terapung-apung di laut selama sehari-hari tanpa harapan mungkin ke Aceh.

Hasil workshop *multi-stakeholders* yang dilaksanakan oleh Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia – UNHCR – Unimal dan dihadiri juga oleh institusi keamanan seperti Lanal, Polairud, Kodim 0103, dan Polres Lhokseumawe menyatakan dengan tegas bahwa problem pengungsian Rohingya selama ini memberikan risiko pada keamanan nasional.

Hasil pemantauan selama ini bahwa pengungsian Rohingya yang mendarat tidak berasal dari pusat konflik, yaitu Provinsi Rakhine, tapi dari limpahan pengungsian seperti Cox's Bazar, Bangladesh. Tempat pengungsian Cox's Bazar sendiri adalah tempat penampungan pengungsi terbesar di dunia yang akhirnya menjadi masalah sendiri akibat kepadatan, kekumuhan, dan kurangnya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang dialami. Banyak para pengungsi menggunakan "jaringan eksploitasi manusia" untuk bisa keluar dari Cox's Bazar dan tiba di negara tujuan utama. Jaringan perdagangan manusia ini menyebar sepanjang lautan Selat Melaka, tak terkecuali di Aceh yang berkamufase sebagai nelayan.

Alasan Kemanusiaan

Ketika akhirnya mereka bisa mendarat pada 31 Desember 2021 di perairan Aceh, tak lepas dari sinyal Jakarta untuk membiarkan mereka masuk. Tidak ada alasan lain yang digunakan kecuali kemanusiaan. Pemerintahan Jokowi memang cukup responsif dalam penanganan para pengungsi dari luar negeri dengan mengeluarkan Perpres 125 tahun 2016. Ini adalah salah satu solusi terbaik ketika Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang hak-hak dasar pengungsi.

Namun alasan kemanusiaan dengan mudah menjadi rapuh. Pembelaan itu dikicuh dengan sikap para pengungsi yang sebenarnya tidak pernah betah di Aceh. 105 pengungsi yang berhasil mendarat itu akhirnya kembali menghilang dari tempat penampungan BLK Kandang, Lhokseumawe. Per 18 Januari 2022, delapan orang telah berhasil melarikan diri, dan beberapa lainnya masih terus mencoba kabur (*Serambi*, 22 Januari 2022). Seperti pengalaman sebelumnya, para pengungsi menghilang dan memilih destinasi impian mereka sebenarnya.

Berdasarkan SE Mendagri No. 300/2307/SJ tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi, Aceh tidak menjadi 13 rumah detensi imigrasi (Rudenim) yang memiliki fasilitas dalam penanganan pengungsi luar negeri. Itu pula yang menjadi hal kompleks lain ketika para pengungsi tiba di Aceh, pemerintah setempat kelabakan, seperti kasus pendaratan Rohingya 31 Desember 2021. Satgas Penanganan Pengungsi Kota Lhokseumawe akhirnya menyerah menangani para pengungsi dan meminta segera dipindahkan ke Rudenim terdekat.

Demikian pula solidaritas kemanusiaan warga Aceh dalam membantu para pengungsi. Euforia itu biasa hanya terjadi pada dua minggu awal "ketibaan tamu", sebelum akhirnya tenggelam dalam rutinitas dan kesulitan hidup sehari-hari. Bahkan pada penanganan pengungsi yang lalu, masyarakat sekitar BLK di Kandang yang rata-rata miskin sempat terjadi kecemburuan sosial karena fasilitas yang diterima oleh "orang nan jauh di sana" lebih baik dibandingkan warga tempatan.

Akhirnya, untuk menghindari ketegangan sosial dengan masyarakat sekitar, organisasi penanganan pengungsi Rohingya, memberikan program integrasi sosial-ekonomi untuk mengurangi dampak kemiskinan masyarakat sekitar. Politik bantuan memang kadang kejam dengan klasifikasi siapa yang perlu dibantu dan siapa yang disisihkan.

Yang jarang terungkap

Tanggal: 31 January 2022

Post by: [Tami](#)

Kategori: [News](#), [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Unimal](#), [Aceh](#),